

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Standar pendidikan suatu negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap kualitas sumber daya manusianya. Salah satu cara untuk menilai kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan yang merupakan investasi sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa harus dilakukan secara fokus, terorganisir, dan ketat.

Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar dalam membangun pendidikan karena negaranya yang luas. Salah satu masalah lain yang menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia adalah pemerataan pembangunan. Banyak wilayah yang masih kekurangan akses pendidikan yang memadai.

Kemajuan pendidikan di Indonesia pasti tidak dihentikan oleh kendala yang ada. Kebijakan pemerintah dan satuan pendidikan akan memberikan pendidikan berkualitas tinggi jika ada tekad yang kuat, kebijakan yang tepat, dan kekompakan antara masyarakat. Kemajuan dalam pendidikan di Indonesia sudah mulai terlihat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sejak dini dan pendidikan tinggi terus meningkat, serta jumlah sekolah yang menggunakan teknologi digital untuk mengajar dan beradaptasi dengan perubahan.

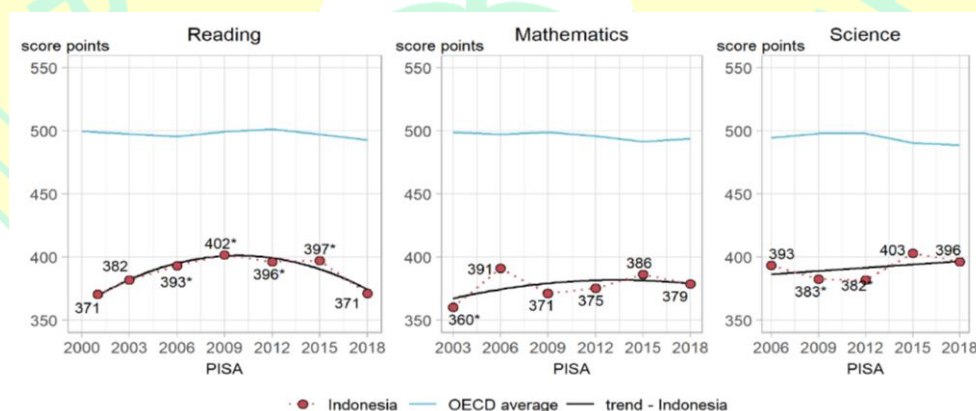
Angka rata-rata lama sekolah (RLS) dan tingkat partisipasi siswa Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada 1950, warga Indonesia berusia 25 tahun ke atas memiliki lama sekolah kurang dari 2 tahun, kemudian meningkat menjadi 4 tahun pada 1990, dan berlipat ganda menjadi 8 tahun pada 2015 (World Bank, 2020).

Selain itu, laporan World Bank menyatakan bahwa setidaknya 4,2 juta orang Indonesia tamat dari sistem pendidikan setiap tahunnya. Siswa rata-rata menyelesaikan sekolah pada usia 16, dengan durasi pendidikan 10,94 tahun. Namun, banyak lulusan sekolah menengah yang tidak memiliki kemampuan

yang diperlukan di dunia kerja dan akhirnya mendapatkan pekerjaan dengan gaji rendah (World Bank, 2020).

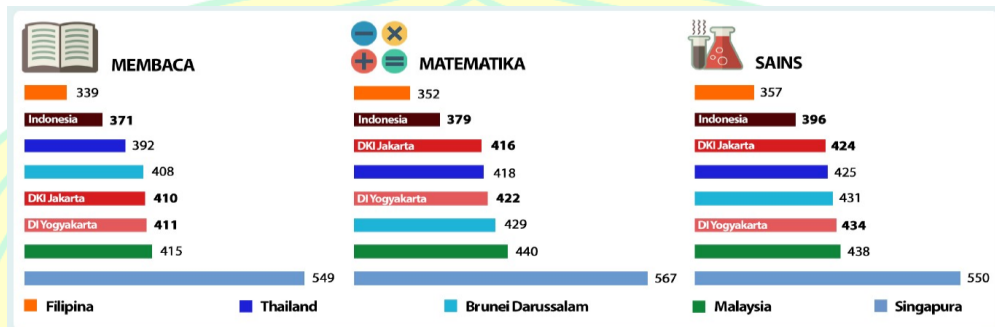
Lebih dari lima puluh lima persen siswa gagal mencapai kompetensi minimum dalam literasi dan matematika. Data World Bank lainnya menunjukkan bahwa 40% siswa di kelas dua tidak tahu angka dua digit dan 50% siswa di kelas empat tidak dapat mengurutkan kumpulan angka empat digit berdasarkan nilainya. Ketika siswa masuk ke kelas berikutnya, kondisi ini tetap ada (World Bank, 2020).

Laporan Bank Dunia di atas menunjukkan bahwa meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, pembelajaran masih belum mencapai tingkat yang memuaskan. Menurut Program Penilaian Siswa Internasional (PISA), kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Negara-negara anggota Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) memperoleh skor tinggi di atas rata-rata. Sementara siswa Indonesia menerima skor di bawah rata-rata pada PISA 2018 untuk kemampuan membaca, matematika, dan sains, masing-masing dengan skor 371, 379, dan 376. Sebagian besar siswa bahkan tidak mencapai kompetensi minimal di tiga bidang tersebut: 70% dalam membaca, 71% dalam matematika, dan 60% dalam sains. Hasil PISA 2018 cukup signifikan karena mewakili 85% anak usia 15 tahun (Kemendikbud, 2019).



Gambar 1. 1. Capaian Belajar Murid Indonesia pada PISA 2018 (sumber: https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_IDN.pdf)

Pada gambar di atas, terlihat bahwa capaian belajar murid Indonesia di PISA untuk kemampuan membaca dan matematika cenderung menurun, terutama pada tiga tahun terakhir kepesertaan Indonesia di PISA. Sementara jika dibandingkan dengan 5 negara ASEAN lainnya, posisi Indonesia hanya lebih baik jika dibandingkan capaian dari murid Filipina.



Gambar 1. 2. Perbandingan Skor PISA Murid Indonesia di Asia Tenggara (catatan: pada PISA 2018, Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta dilakukan oversampling dan hasilnya skor rata-rata kedua provinsi tersebut di atas rata-rata nasional dan sejajar dengan negara ASEAN lainnya)

Sumber: Infografis Pusat Penilaian Pendidikan

Pada aspek pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif siswa di Indonesia belum seluruhnya merasakan hal tersebut. Survei yang dilakukan oleh UNESCO pada tahun 2016, sekitar 62% siswa di Indonesia merasa aman dalam lingkungan belajar mereka. Namun, hanya sekitar 54% siswa yang merasa nyaman dan senang dengan lingkungan belajar mereka. Selain itu, terdapat juga beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di Indonesia, terutama bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Sebuah studi yang dilakukan oleh UNICEF pada tahun 2018 menunjukkan bahwa sekitar 90% siswa dengan kebutuhan khusus di Indonesia mengalami diskriminasi di sekolah mereka.

Salah satu keberhasilan pencapaian murid ditentukan oleh faktor guru. Sebuah kutipan dari laporan McKinsey di tahun 2007 berbunyi, “*The quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers*” (Barber & Mourshed, 2007) sering sekali digunakan sebagai referensi utama dalam dokumen-dokumen resmi reformasi pendidikan di mancanegara. Kualitas guru

berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar murid juga telah ditunjukkan oleh berbagai hasil penelitian.

Salah satu penelitian klasik (*seminal research*) yang sering menjadi rujukan para ahli dalam menunjukkan pengaruh guru dalam kualitas belajar murid adalah penelitian yang dilakukan oleh William L. Sanders dan June C. Rivers yang dipublikasikan di tahun 1996 (Sanders et al., 1996). Penelitian ini berjudul “*Cumulative and Residual Effects of Teachers on Future Student Academic Achievement.*” Dengan menggunakan data dari *The Tennessee Value Added Assessment System (TVAAS)*, Sanders dan Rivers melakukan analisis statistik secara longitudinal untuk melihat dampak guru (*teacher effects*) terhadap hasil belajar siswa di mata pelajaran matematika di tingkat sekolah dasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak guru bersifat aditif (*additive*) dan kumulatif (*cumulative*) terhadap semua siswa dengan berbagai macam latar belakangnya. Dampak guru efektif dan tidak efektif akan mempengaruhi hasil belajar siswa secara aditif dan kumulatif.

Pengukuran yang dilakukan Sanders dan Rivers ini menunjukkan dalam waktu 3 tahun, guru yang mengajar secara efektif memberi perbedaan hasil belajar siswa 53 poin persentil dibanding guru yang tidak efektif. Dengan kata lain, selama rentang waktu tersebut, guru yang mengajar dengan efektif dapat meningkatkan performa siswa hampir 3 kali lebih baik daripada guru tidak efektif.

Kajian tersebut menemukan bahwa untuk mendukung keberhasilan belajar murid dan mencapai tujuan pendidikan nasional, diperlukan guru yang berkualitas tinggi yang dapat mengajar dan mendidik dengan baik. Guru harus memiliki sejumlah keterampilan penting agar dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang cepat saat ini.

Pemahaman guru terhadap keberagaman latar belakang murid juga menjadi penting. Kemampuan guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sebagai suatu pendekatan pengajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari siswa-siswa di dalam kelas yang memiliki perbedaan latar belakang, kemampuan, gaya belajar, minat, dan

preferensi belajar yang berbeda menjadi penting. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru mengenali perbedaan-perbedaan tersebut dan menyediakan pengalaman pembelajaran yang sesuai untuk setiap siswa.

Jika guru tidak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka beberapa siswa mungkin merasa terabaikan atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Siswa yang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda mungkin kesulitan untuk mengikuti pembelajaran yang diajarkan dengan cara yang sama untuk semua siswa. Beberapa siswa mungkin merasa bosan, tidak termotivasi, atau bahkan tertinggal dalam pembelajaran karena pengalaman belajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sementara itu, siswa yang mendapat manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi dapat mengalami dampak positif pada pembelajaran mereka. Dengan pengalaman belajar yang sesuai dengan gaya belajar, minat, kemampuan, dan kebutuhan mereka, siswa dapat lebih terlibat dalam pembelajaran dan merasa lebih termotivasi. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka dan hasil belajar secara keseluruhan.

Selain itu, pengalaman belajar yang positif dapat memengaruhi persepsi siswa terhadap pendidikan secara keseluruhan dan membantu meningkatkan motivasi belajar mereka di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mengalami pengalaman belajar yang optimal dan mencapai hasil belajar yang maksimal.

Dengan peningkatan kemampuan guru, diharapkan siswa Indonesia dapat menghadapi tantangan Abad 21 dengan menjadi siswa yang bermoral, mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Sangat penting bagi kemajuan pendidikan suatu negara untuk memiliki guru yang berkualitas. Akan ada sumber daya manusia yang unggul, yang akan mendukung kemajuan Indonesia, melalui guru yang berkualitas.

PISA 2018 juga melakukan survey mengenai guru di Indonesia. Hasil survey memperlihatkan bahwa lebih dari 50% murid umur 15 tahun memiliki persepsi positif terhadap guru mereka. Namun persepsi positif tersebut tidak

meliputi persepsi mengenai umpan balik guru terhadap hasil belajar mereka dan mengubah pembelajaran sesuai kebutuhan murid.

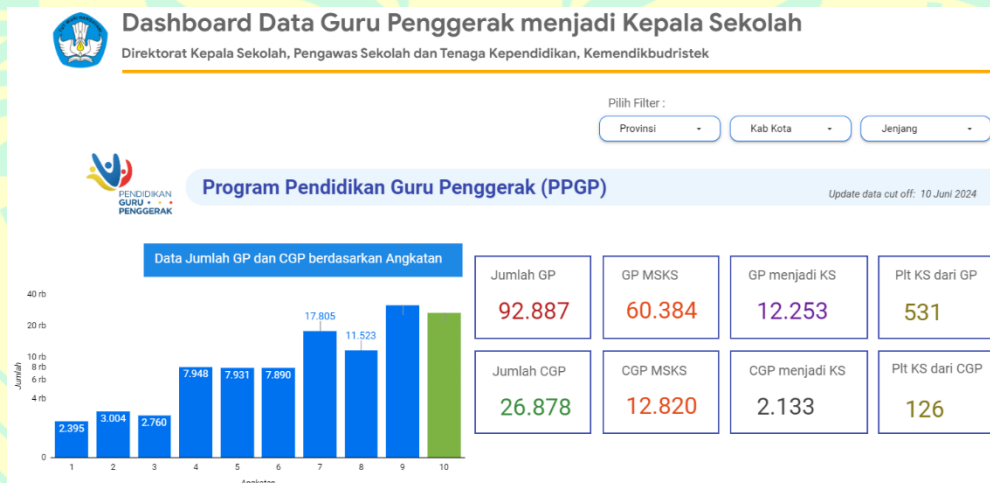
Sebanyak 68% murid merasa bahwa gurunya tidak memberikan respon terhadap proses pembelajaran mereka di banyak atau hampir setiap pelajaran; 60% murid melaporkan kalau guru bahasa Indonesianya tidak pernah atau hanya di beberapa pelajaran memberikan bantuan langsung kepada murid yang kesulitan memahami materi atau melakukan pengubahan materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Temuan ini menguatkan bahwa kualitas pembelajaran guru di Indonesia masih perlu mendapat perhatian khusus, terutama terkait kepemimpinan pembelajaran di kelas (Kemendikbud, 2019).

Melihat fenomena tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 2020-2024 mengembangkan salah satu visinya yaitu berfokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewujudkan visinya melalui Kebijakan Merdeka Belajar dengan merumuskan berbagai strategi untuk mentransformasi pendidikan dari berbagai lini. Mengutip dari Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024, “Merdeka Belajar menjadi semangat yang menjiwai keseluruhan arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Semangat merdeka belajar berarti menekankan murid, guru, orang tua, satuan pendidikan, daerah, komunitas pendidikan, yayasan pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri serta pelaku pendidikan lainnya sebagai aktor yang otonom dan berdaya. Pelaku pendidikan berdaya mengembangkan praktik-praktik baik pembelajaran, manajemen pendidikan, dan kepemimpinan pendidikan yang perlu diperkuat dan ditularkan ke seluruh ekosistem pendidikan sehingga membentuk pembelajaran yang berkualitas”.

Salah satu strategi Merdeka Belajar adalah Program Pendidikan guru Penggerak (PGP). PGP merupakan episode ke-5 dari program Merdeka Belajar. Program ini dicanangkan tanggal 3 Juli 2020 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim. Dalam sambutan pembukaannya,

Mendikbud menyampaikan bahwa guru penggerak adalah penggerak perubahan pendidikan Indonesia, diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang murid secara holistic sehingga menjadi Pelajar Pancasila, menjadi pelatih atau mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan (CNN Indonesia, 2020).

Sampai semester 1 2024, Program PGP telah memasuki angkatan ke 10. Jumlah guru penggerak sebanyak 92.887 orang dan calon guru penggerak sebanyak 26.878 orang yang berasal dari 514 kabupaten/kota. Angkatan 1 sampai 9 telah menyelesaikan pendidikan sedangkan angkatan 10 masih berproses dalam pendidikan. Dari sejumlah 92.887 guru penggerak sebanyak 60.384 (65,01%) merupakan guru penggerak yang memenuhi syarat sebagai kepala sekolah. Dari sejumlah 60.384 guru penggerak tersebut sebanyak 12.253 (20,29%) orang telah diangkat sebagai kepala sekolah. (*Cut off*: data 10 Juni 2024).



Gambar 1. 3. Data Program Pendidikan Guru Penggerak
Sumber: Dashboard Data Guru Penggerak Menjadi Kepala Sekolah (*cut off*: 10 Juni 2024)

Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan jenjang, jumlah guru penggerak sekolah dasar lebih banyak diangkat dibanding jenjang lainnya, yaitu sebanyak 33,72%. Sementara guru penggerak jenjang SMK paling sedikit diangkat yaitu 5,92%. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1. Prosentase Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah berdasarkan Jenjang

No	Jenjang	GP MSKS	Diangkat KS	%
1	PAUD	3.050	751	24,62
2	SD	25.633	8.643	33,72
3	SLB	426	74	17,37
4	SMA	10.299	617	6,03
5	SMK	5.983	354	5,92
6	SMP	15.033	1.814	12,07
7	Kesetaraan	7	0	0
8	Blank	23	0	0
Jumlah/rerata		60.384	12.253	20,29

Sumber: Dashboard Data Guru Penggerak Menjadi Kepala Sekolah (*cut off*: 10 Juni 2024)

Berdasarkan data pada tabel 1.1. di atas terlihat bahwa pengangkatan guru penggerak paling banyak pada jenjang sekolah dasar. Secara nasional prosentasenya mencapai 33,72%. Selanjutnya bila dilihat berdasarkan provinsi, terdapat 10 provinsi yang memiliki prosentase tertinggi pada pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar. Kesepuluh provinsi tersebut adalah Gorontalo (49,40%), Kalimantan Selatan (46,88%), Bali (46,74%), Kepulauan Bangka Belitung (45,34%), Jawa Timur (40,51%), Jawa Tengah (39,93%), Jawa Barat (36,80%), Nusa Tenggara Barat (36,17%), Kalimantan Barat (33,09%), dan Jambi (32,02%). Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2. Prosentase Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah jenjang Sekolah Dasar berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	GP MSKS	Diangkat KS	%
1	Aceh	472	89	18,86
2	Bali	552	258	46,74
3	Banten	712	204	28,65
4	Bengkulu	193	39	20,21
5	DI Yogyakarta	414	126	30,43
6	DKI Jakarta	768	137	17,84
7	Gorontalo	166	82	49,40
8	Jambi	203	65	32,02
9	Jawa Barat	3.454	1.271	36,80
10	Jawa Tengah	5.247	2.095	39,93

No	Provinsi	GP MSKS	Diangkat KS	%
11	Jawa Timur	4.199	1.701	40,51
12	Kalimantan Barat	417	138	33,09
13	Kalimantan Selatan	497	233	46,88
14	Kalimantan Tengah	124	46	37,10
15	Kalimantan Timur	269	79	29,37
16	Kalimantan Utara	52	12	23,08
17	Kepulauan Bangka Belitung	161	73	45,34
18	Kepulauan Riau	272	43	15,81
19	Lampung	583	171	29,33
20	Maluku	156	37	23,72
21	Maluku Utara	60	16	26,67
22	Nusa Tenggara Barat	575	208	36,17
23	Nusa Tenggara Timur	506	157	31,03
24	Papua	38	12	31,58
25	Papua Barat	28	2	7,14
26	Papua Barat Daya	31	6	19,35
27	Papua Pegunungan	10	1	10,00
28	Papua Selatan	24	5	20,83
29	Papua Tengah	21	5	23,81
30	Riau	514	117	22,76
31	Sulawesi Barat	174	56	32,18
32	Sulawesi Selatan	1.414	343	20,26
33	Sulawesi Tengah	380	119	31,32
34	Sulawesi Tenggara	191	47	24,61
35	Sulawesi Utara	150	23	15,33
36	Sumatera Barat	1.080	267	24,72
37	Sumatera Selatan	565	98	17,35
38	Sumatera Utara	961	262	27,26
Jumlah/rerata		25.633	8.643	33,72

Sumber: Dashboard Data Guru Penggerak Menjadi Kepala Sekolah (*cut off*: 10 Juni 2024)

Khusus untuk provinsi Jawa Barat, pengangkatan guru penggerak jenjang sekolah dasar menjadi kepala sekolah mencapai 36,80%. Ini adalah angka tertinggi ke 3 di pulau jawa setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketiga provinsi tersebut jika digabungkan jumlah guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar mencapai 58,63% dari capaian nasional. Adapun prosentase pengangkatan kepala sekolah dari guru penggerak untuk provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1. 3. Prosentase Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah Jenjang Sekolah Dasar menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	GP MSKS	Diangkat KS	%
1	Kab. Bandung	262	89	34,00
2	Kab. Bandung Barat	162	69	42,59
3	Kab. Bekasi	158	78	49,38
4	Kab. Bogor	246	123	50,00
5	Kab. Ciamis	107	40	37,38
6	Kab. Cianjur	169	90	53,25
7	Kab. Cirebon	202	94	46,53
8	Kab. Garut	232	83	35,77
9	Kab. Indramayu	124	61	49,19
10	Kab. Karawang	115	33	28,70
11	Kab. Kuningan	99	25	25,25
12	Kab. Majalengka	106	49	46,23
13	Kab. Pangandaran	33	14	42,42
14	Kab. Purwakarta	81	3	3,70
15	Kab. Subang	120	51	42,50
16	Kab. Sukabumi	186	80	43,01
17	Kab. Sumedang	145	42	28,97
18	Kab. Tasikmalaya	196	70	35,71
19	Kota Bandung	169	9	5,33
20	Kota Banjar	54	13	24,07
21	Kota Bekasi	90	13	14,44
22	Kota Bogor	84	16	19,05
23	Kota Cimahi	71	20	28,17
24	Kota Cirebon	46	16	34,78
25	Kota Depok	93	57	61,29
26	Kota Sukabumi	46	20	43,48
27	Kota Tasikmalaya	58	13	22,41
Jumlah/rerata		3.454	1.271	36,80

Sumber: Dashboard Data Guru Penggerak Menjadi Kepala Sekolah (*cut off*: 10 Juni 2024)

Pendidikan guru penggerak menekankan pada pedagogi serta berfokus pada murid dan pengembangannya secara holistic, pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui on-the-job coaching, pendekatan formatif dan berbasis pengembangan, serta kolaboratif dengan pendekatan sekolah menyeluruh. Ada beberapa alasan yang menjadi pijakan program PGP.

Alasan pertama, pendidikan guru penggerak berupaya memperkuat filosofis pendidikan nasional. Menurut Ki Hajar, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan manusia. Pendidikan dikatakan berhasil bila melahirkan manusia merdeka. Manusia dikatakan merdeka jika manusia itu selamat (*survive*) raganya dan bahagia (*happy*) jiwanya. Berdasarkan pemahaman ini, Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan harusnya memerdekakan manusia, menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Sehingga yang dimaksud dengan mendidik adalah proses memanusiakan manusia (Febriyanti, 2021). Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya secara lahir dan batin tidak terganggu kepada orang lain, akan tetapi ia mampu bersandar dan berdiri di atas kakinya sendiri (Sugiarta et al., 2019) yang nantinya akan mengangkat manusia ke taraf insani.

Alasan kedua lahirnya pendidikan guru penggerak adalah tantangan literasi IT baik itu Revolusi Industri 4.0 maupun *Society 5.0*. Tantangan revolusi industri 4.0 sudah bukan lagi sesuatu yang jauh tapi sudah kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Revolusi industri 4.0 ditandai dengan disrupsi hampir semua kegiatan manusia, termasuk di dalamnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Rhenald Kasali dalam bukunya *Disruption*, menuliskan bahwa disrupsi adalah inovasi (Kasali, 2017). Inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru dengan prinsip sesuatu yang benar-benar baru, lebih efisien, dan juga lebih bermanfaat. Disrupsi dapat dicirikan melalui VUCA, yaitu perubahan yang masif, cepat, dengan pola yang sulit ditebak (*Volatility*), perubahan yang cepat menyebabkan ketidakpastian (*Uncertainty*), terjadinya kompleksitas hubungan antar faktor penyebab perubahan (*Complexity*), dan kurang jelas arah perubahan yang menyebabkan ambiguitas (*Ambiguity*) (Mukhlisin, 2019). Ada tiga karakter utama yang harus dikembangkan dalam era revolusi industri 4.0 yaitu: inovasi, otomasi dan transfer informasi (Kusnohadi, 2019).

Tantangan berikutnya adalah *society 5.0* yang dimaknai sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan sistem yang sangat mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik (Mardiya, 2019). *Society 5.0* mendeskripsikan bentuk ke-5 dari kemasyarakatan dalam sejarah manusia. Secara berurutan bentuk-bentuk kemasyarakatan dapat diurutkan dari masyarakat yang mengandalkan perburuan (*Society 1.0*), masyarakat yang hidup dalam pertanian (*Society 2.0*), masyarakat berbasis industri (*Society 3.0*), dan masyarakat informasi (*Society 4.0*). Setelah revolusi industri keempat, nilai-nilai dan layanan baru muncul, yang menghasilkan masyarakat 5.0. Kehidupan sosial masyarakat 5.0 akan mencakup masyarakat yang berfokus pada depan dan menghapus stagnasi; masyarakat dimana orang-orang menghargai satu sama lain dan melampaui generasi; dan masyarakat dimana setiap orang memiliki kesempatan untuk menjalani hidup aktif dan menyenangkan (Rahman, 2019).

Alasan ketiga lahirnya program guru penggerak adalah konsep *on-the-job learning*. *On-the-job learning* adalah proses pelatihan yang lebih banyak waktu belajarnya di tempat kerja. Pendidikan guru penggerak didesain lebih banyak dilakukan di kelas bersama siswa dan di sekolah bersama teman sejawat. Pada keadaan ini siswa juga tetap memperoleh hak-haknya untuk menerima pembelajaran. Desain pendidikan guru penggerak disusun dengan membagi prosentase pelatihan sebanyak 10 % pembelajaran daring bersama instruktur, narasumber, dan fasilitator; 20 % belajar bersama teman sejawat dan pendamping; 70% belajar ditempat kerja dan komunitas praktisi.

Meskipun telah meluluskan sebanyak 61.256 orang yang berasal dari 514 kabupaten/kota dan dilaksanakan secara terencana, namun demikian dampak yang diharapkan dari pendidikan guru penggerak belum terlihat secara jelas. Untuk melihat dampak pendidikan guru penggerak perlu dilakukan melalui evaluasi yang komprehensif.

Alasan lain diperlukannya evaluasi program pendidikan guru penggerak adalah tantangan yang dihadapi pada proses pendidikan guru

penggerak itu sendiri. Tantangan tersebut adalah animo peserta, penguasaan IT, kekuatan sinyal internet, pemantauan, dan kualitas aktor pendukung.

Animo guru untuk mengikuti program guru penggerak berbeda antar kabupaten/kota. Banyak faktor yang menyebabkan perbedaan ini, antara lain kecenderungan untuk berkarir pasca menjadi guru penggerak, keuntungan yang diperoleh, mencoba keberuntungan, dan akses.

Penguasaan IT peserta juga masih menjadi kendala untuk terlaksananya program ini dengan baik. Program ini sebagian besar dilakukan melalui daring dengan banyak berinteraksi dengan teknologi informasi. Keterbatasan penguasaan IT menjadi bagian yang perlu dievaluasi.

Kekuatan sinyal internet bukan isu baru. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mengungkapkan setidaknya 11% daerah di Indonesia masih berada dalam area blank spot wilayah seluler utamanya di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) serta perbatasan (Informasi, 2018). Sementara data dari Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementaerian Komuinikasi dan Infomatika, Ahmad M. Ramli mengatakan tidak kurang 12.548 desa di Indonesia belum memperoleh sentuhan sinyal internet hingga hari ini (Francisca Christy Rosana, 2020).

Pemantauan program pendidikan guru penggerak bukan pekerjaan sederhana, selain jumlah peserta yang banyak, penyebarannya cukup besar di kisaran 514 kabupaten/kota, dan jadwal yang bersamaan tentunya memerlukan mekanisme pemantauan yang efektif dan tenaga yang banyak pula. Pemantauan ini sangat penting untuk melihat proses pendidikan yang terjadi di lapangan.

Tantangan lainnya adalah kualitas aktor pendukung. Aktor pendukung adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan calon guru penggerak dalam hal ini adalah pendamping, fasilitator, dan instruktur. Keberhasilan program ini ditentukan pula oleh kualitas aktor pendukung tersebut. Walaupun aktor pendukung tersebut telah lulus seleksi namun perjalanan pendidikan selama 6 - 9 bulan adalah masa yang cukup panjang. Konsistensi dan komitmen untuk melayani dan mendampingi peserta perlu terus untuk diketahui.

Tantangan-tantangan di atas menunjukkan masih adanya faktor kesulitan dalam mengimplementasikan program pendidikan guru penggerak. Tantangan-tantangan tersebut akan memberi dampak pada tercapainya pendidikan guru penggerak. Dalam hubungannya dengan isu-isu tersebut, evaluasi dampak pendidikan guru penggerak perlu dilakukan. Untuk melakukan evaluasi dampak ini digunakan model evaluasi *Goal Free Evaluation* (GFE).

Evaluasi dampak bebas tujuan atau yang dikenal dengan *Goal-Free Evaluation* (GFE) didefinisikan sebagai model evaluasi dimana evaluator dengan sengaja menghindari tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya atau evaluator melakukan evaluasi tanpa sepengetahuan atau acuan apapun mengenai tujuan awal dari program yang sedang dievaluasi (Youker, 2013). Tujuan dari GFE adalah untuk mengendalikan bias yang biasanya terjadi dalam evaluasi berbasis tujuan – bias mempengaruhi kemampuan evaluator untuk melihat hasil aktual dari program dan pencapaian yang sebenarnya. Dengan demikian, evaluasi dampak lebih mandiri atau bebas dari intervensi apapun, dan hasil evaluasi lebih objektif.

Evaluasi dampak pendidikan guru penggerak dengan menggunakan model GFE dilakukan untuk memperkuat implementasi pendidikan guru penggerak di Indonesia. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi aktual untuk implementasi pendidikan guru penggerak secara independen dan obyektif. Evaluasi ini juga diharapkan hasilnya dapat digunakan sebagai input bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang memperkuat pendidikan guru penggerak di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak implementasi pendidikan guru penggerak dan diskusi tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan pendidikan guru penggerak, dan komponen-komponen pendidikan guru penggerak yang memerlukan peningkatan. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melihat dampak program pendidikan guru penggerak di Provinsi Jawa Barat dengan melakukan evaluasi Program Pendidikan Guru Penggerak di Provinsi Jawa Barat. Sehingga peneliti

mengajukan judul penelitian “Evaluasi Program Pendidikan Guru Penggerak di Wilayah Provinsi Jawa Barat”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah dampak program pendidikan guru penggerak di Provinsi Jawa Barat. Adapun rumusan sub fokus penelitian meliputi:

1. Partisipasi guru penggerak dalam program pendidikan guru penggerak
2. Interaksi dan kerjasama yang terjadi antara guru penggerak dengan guru-guru di sekolah
3. Kualitas pengajaran guru penggerak
4. Keterampilan guru penggerak
5. Dampak program guru penggerak baik yang diharapkan (positif), tidak diharapkan (negatif), dan netral.

C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan umum penelitian adalah bagaimana dampak program pendidikan guru penggerak di Provinsi Jawa Barat? Sedangkan untuk menjawab pertanyaan umum tersebut dikembangkan pertanyaan-pertanyaan turunan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi guru penggerak dalam program pendidikan guru penggerak?
2. Bagaimana interaksi dan kerjasama antara guru penggerak dengan guru lainnya di sekolah?
3. Bagaimana peningkatan kualitas pengajaran guru penggerak?
4. Bagaimana peningkatan keterampilan guru penggerak?
5. Bagaimana dampak positif, negatif, dan netral program pendidikan guru penggerak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah menemutunjukkan dampak Program Pendidikan Guru Penggerak di Wilayah Provinsi Jawa Barat melalui:

1. Analisis partisipasi guru penggerak dalam program pendidikan guru penggerak;
2. Analisis interaksi dan kerjasama antara guru penggerak dengan guru lainnya di sekolah;
3. Analisis peningkatan kualitas pengajaran guru penggerak.
4. Analisis peningkatan keterampilan guru penggerak;
5. Analisis dampak program guru penggerak baik yang diharapkan (positif), tidak diharapkan (negatif), maupun netral.

Tujuan penelitian berikutnya adalah menghasilkan model pengembangan program pendidikan guru penggerak sebagai pijakan pelaksanaan program ke depannya.

E. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai pengembangan dari ilmu pengetahuan dalam kajian lebih lanjut tentang program pendidikan guru penggerak.

1. Signifikansi Teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang baik dalam khasanah keilmuan dan hasil dari penelitian ini menjadi bagian proses pengkajian program pendidikan guru penggerak.

2. Signifikansi Praktis

Secara praktis peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi positif sebagai bahan pertimbangan dalam program pendidikan guru penggerak, yaitu :

- a. Sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan jajarannya dalam peningkatan mutu penyelenggaraan program pendidikan guru penggerak.
- b. Memberikan alternatif perbaikan pada aspek-aspek yang perlu ditingkatkan/dikembangkan/diperbaiki dalam perumusan, implementasi, dan kinerja program pendidikan guru penggerak.

- c. Memberikan pemahaman baru bagi pemangku kepentingan tentang program pendidikan guru penggerak.

F. *State of the Art*

Program pendidikan guru penggerak adalah program yang relatif baru diluncurkan sehingga belum banyak yang meneliti tentang hal tersebut. Walaupun demikian dalam dua tahun terakhir ada beberapa penelitian yang telah mengangkat tema tentang program pendidikan guru penggerak. Satriawan dalam penelitiannya tentang Guru Penggerak dan Transformasi Sekolah dalam Kerangka Inkuiri Apresiatif (Satriawan et al., 2021) mengangkat tema tentang wacana-wacana penting tentang peran guru agen dalam proses transformasi organisasi dengan berfokus pada peran guru penggerak dalam proses transformasi sekolah melalui kerangka apresiatif inquiry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program guru penggerak telah menggeser pengelolaan perubahan pendidikan dari pola sentralisasi menuju desentralisasi dengan mengaktifkan guru sebagai agen dan sekolah sebagai pusat transformasi.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Pramono dengan judul *Teacher's Perception of Government Policy about the Mover Teacher* (Pramono et al., 2021) yang mengangkat tema mengenai persepsi guru terhadap kebijakan guru penggerak. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa program guru penggerak bertujuan untuk menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru penggerak diharapkan dapat menjadi katalisator perubahan pendidikan di sekolah dan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi guru sudah selaras dengan konsep guru penggerak yang diluncurkan oleh pemerintah. Para guru menyatakan bahwa untuk menjadi pemimpin pembelajaran, guru perlu memiliki sifat kepemimpinan, berjiwa Pancasila, mengutamakan peserta didik, inovatif, kreatif, cerdas, berpikir kritis, menguasai teknologi informasi, dan empat kompetensi guru.

Penelitian di atas telah menyinggung salah satu bagian peran guru penggerak sebagai agen transformasi pendidikan di Indonesia termasuk persepsi guru terhadap program pendidikan guru penggerak. Namun dari kedua

penelitian tersebut belum ada yang menyinggung mengenai dampak program pendidikan guru penggerak secara keseluruhan. Apakah pendidikan guru penggerak memiliki dampak positif, negatif, atau dampak sampingan. Melihat dampak ini penting untuk melihat keberlangsungan program ke depannya.

Penelitian ini diharapkan juga mampu mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang selama ini belum tersentuh. Ada tiga perbedaan mendasar yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu:

- a) Penelitian ini berfokus pada dampak program pendidikan guru penggerak
- b) Penelitian ini menganalisis dampak implemementasi, mendiskusikan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan program, dan komponen-komponen yang perlu ditingkatkan pada program pendidikan guru penggerak.
- c) Penelitian ini juga akan memberikan masukan dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait tentang perbaikan program pendidikan guru penggerak selanjutnya.